



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harun Sulianto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dhahana Putra

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Plt. Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-Undangan

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Dhahana Putra  
NIP. 19690909 199303 1 001

Harun Sulianto  
NIP. 19650408 198703 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
BANGKA BELITUNG DENGAN DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

| <b>No.</b> | <b>Sasaran Strategis</b>                                                                                   | <b>Indikator Kinerja Utama</b>     | <b>Target</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>(1)</b> | <b>(2)</b>                                                                                                 | <b>(3)</b>                         | <b>(4)</b>    |
| 1.         | Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan | Indeks kualitas perundang-undangan | 3,2 (Indeks)  |

| <b>No.</b> | <b>Sasaran Program</b>                                     | <b>Indikator Kinerja Program</b>                                                                      | <b>Target</b> |
|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>(1)</b> | <b>(2)</b>                                                 | <b>(3)</b>                                                                                            | <b>(4)</b>    |
| 1.         | Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas | 1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan  | 80%           |
|            |                                                            | 2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan           | 200 Orang     |
|            |                                                            | 3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan | 80%           |

| <b>No.</b> | <b>Sasaran Kegiatan</b>                                           | <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>                                                    | <b>Target</b> |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>(1)</b> | <b>(2)</b>                                                        | <b>(3)</b>                                                                           | <b>(4)</b>    |
| 1.         | Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah                 | Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham         | 80%           |
| 2.         | Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan | Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan | 16 Orang      |

| Kegiatan                                                   | Anggaran                  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Program Pembentukan Regulasi</b>                        | <b>Rp. 209,570,000 ,-</b> |
| Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah | Rp. 209,570,000 ,-        |

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Plt. Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra  
NIP. 19690909 199303 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Harun Sulianto  
NIP. 19650408 198703 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harun Sulianto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Harun Sulianto

NIP. 19650408 198703 1 002